Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045

PEMERINTAH Aceh saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045. RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Aceh dalam jangka waktu 20 tahun.

RPJPA ini berisikan masalah pembangunan dan isu strategis yang harus diselesaikan, dengan menetapkan sasaran pokok sesuai dengan Harapan RPJPN 2025-2045. Tak hanya itu, RPJPA juga harus tepat dalam menetapkan arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok selama empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) ke depan 2025-2045.

RPJPA ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan.

Karenanya mohon masukan kepada para pembaca semua melalui atau langsung dikirimkan secara tertulis ke **Kantor Bappeda Aceh, Jalan Daud Beureueh No 26, Kuta Alam, Banda Aceh, dan juga melelui email: bappeda@acehprov.go.id.**

Permasalahan Pembangunan Aceh

Permasalahan pembangunan Aceh dua puluh tahun yang akan datang adalah karakteristik lokasi dan wilayah Aceh yang berada di ujung barat Indonesia memiliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan strategi seperti diversifikasi ekonomi fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang dapat diakomodasi oleh kondisi geografis daerah, pembangunan kemitraan, berkolaborasi dengan universitas dan riset, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 149.1/tinggi sedangkan nasional adalah sebesar 138,81 yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. Aceh memiliki 11 potensi bencana yaitu: banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kebakaran, letusan gunung api, cuaca ekstrem/angin puting beliung dan tanah longsor.

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi diatas rata-rata nasional, yaitu Aceh 53,75 persen (2022) sedangkan nasional sebesar 44,67 persen (2022). Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam kaitan ini kewenangan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum masuk tupoksi di Pemerintah Aceh.

Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan -0,34 persen akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid-19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2,79 persen dan pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen. Angka kemiskinan Aceh sebesar 14,75 persen pada September 2022 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,57 persen pada periode yang sama.

Pada tahun 2022 inflasi Aceh sebesar 5,89 persen dan lebih buruk dari tahun 2021 sebesar 2,24 persen. Inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2022 disebabkan faktor ekonomi global terutama terhadap kenaikan harga makanan. Bila dibandingkan dengan Inflasi Nasional, maka nilai inflasi Aceh relatif masih tinggi, dimana Inflasi Nasional pada tahun 2022 sebesar 5,51 persen dan Aceh sebesar 5,89 persen.

Pendapatan perkapita masyarakat Aceh yang diukur menurut PDRB ADHB baik dengan migas maupun non migas menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2020 pendapatan perkapita sebesar Rp 31,63 juta dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp 34,68 juta dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp 39,16 juta.

Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nasional, maka Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2020 PDB Perkapita Nasional sebesar Rp 57,3 juta dan tahun 2021 sebesar Rp 62,2 juta (US$ 4.349,4) atau kenaikan sebesar 3,69 persen dan tahun 2022 menjadi Rp 71,03 juta. Indonesia berada di kategori kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dengan pendapatan antara US$ 1,046 - US$ 4,095.

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0.291. Nilai Indek Gini Aceh relatif lebih baik bila dibandingkan dengan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh termasuk kategori rendah. Namun kondisi ini juga masih mengindikasikan dan berkorelasi terhadap terjadinya kenaikan angka kemiskinan tahun 2021.

Pada Februari 2022, terdapat sekitar 157.568 Pengangguran Terbuka (PT) di Provinsi Aceh, dengan tingkat pengangguran Aceh sebesar 6,17 persen. Sedangkan nasional sebesar 5,97 persen.

Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IPM Aceh pada tahun 2022 sebesar 72,80, naik 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2021) sebesar 72,80. Sedangkan IPM Nasional pada tahun 2022 relatif lebih tinggi dan berada di atas rata-rata IPM Aceh yaitu sebesar 72.91. Kondisi pencapaian nilai IPM Aceh ini masih menjadi perhatian yang serius mengingat terjadinya disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.

Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA. Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus (otsus), namun Aceh masih membutuhkan banyak dukungan dana dalam mendukung penyelesaian reintegrasi dan penguatan terhadap perdamaian serta penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil survey Indeks Pembangunan Syariah Aceh didapati bahwa capaian pada dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, dan Hukum Jinayat masih relatif rendah. Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait perlu memprioritaskan kegiatan sosialisasi tentang LKS. Implementasi LKS belum berjalan secara optimal di Aceh antara lain disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang LKS (pengenalan qanun, prinsip mualamah Islam, sektor usaha syariah dll).

Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah melakukan konversi menjadi LKS umumnya dari sektor perbankan, sementara lembaga keuagan lain (asuransi, koperasi, dll) kebanyakannya belum melaksanakan konversi. Permasalahan lain yang juga masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat adalah belum tersedianya fitur-fitur tertentu yang dahulunya ditawarkan oleh bank konvensional. Tingkat kesyariahan sebuah LKS meskipun telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) masih juga diperdebatkan.

Sebahagian dari permasalahan tersebut diyakini dapat terselesaikan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang memadai. Terkait upaya mendongkrak kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat pada Baitul Mal. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan dan juga pemberian insentif tertentu dalam bentuk yang mungkin dilakukan (sertifikat penghargaan, pemudahan perizinan, dll). Untuk dimensi Jinayat, Pemerintah Aceh harus berupaya lebih keras lagi untuk mengisi kekosongan yang ada selama ini di berbagai level implementasi seperti memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk sosialisasi dan penyuluhan dan juga untuk lembaga penegak hukum vertikal, memastikan ketersedian sarana dan prasarana, ketersedian PPNS, keseriusan dalam pemberian sanksi pada pelaku usaha yang terbukti melanggar dan lainnya.

Masih tingginya pelanggaran syariat Islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah. Pelanggaran syariat Islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat Islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 Kabupaten/Kota.

Kemandirian dayah Tahun 2022 masih rendah, yang ditandai dengan capaian standarisasi dayah. Dari 1.488 dayah yang sudah terakreditasi yang ada di Aceh, hanya 862 dayah yang bertipe (A+, A, B, dan C) atau sekitar 57,93 persen. Sedangkan 626 dayah atau sekitar 42,07 persen masih merupakan dayah non tipe. Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah, permasalahan ini disebabkan karena masih kurangnya inisiatif pihak dayah untuk membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya para santri mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan dsb, yang nantinya secara langsung akan berdampak pada perbaikan ekonomi dan kemandirian ekonomi dayah itu sendiri.

Hal tersebut akan sedikit mengurangi ketergantungan dayah-dayah pada pemerintah, jika kemandirian secara ekonomi dayah sudah bagus, tanpa disubsidi pun oleh pemerintah, mereka sudah mampu menanggulangi sendiri segala kebutuhan operasional dayah misalnya untuk membayar honor tenaga pendidik, membangun sarana dan prasarana dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal hal ini ditandai dengan besarnya silpa dari Ziswaf pada tahun 2023 ini hampir mencapai Rp 114 Miliar. Hal ini disebabkan karena terkendalanya dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian, disamping itu masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab.

Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh yaitu sebesar 48,89 persen dan nasional 51,90 persen. Data korban konflik yang belum akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh sudah berada diatas Nasional yaitu 14,37 tahun dan Nasional 13,10 tahun. Namun angka ini masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh UNDP dan dijadikan referensi oleh Indonesia melalui Badan Pusat Statistik yaitu 18 tahun. Kabupaten Aceh Timur memiliki HLS yang berada dibawah Nasional yaitu 13,06 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh sudah lebih baik dibandingkan dengan Nasional, dimana RLS Aceh berada di 9,44 tahun dan Nasional berada di 8,69 tahun. Namun angka ini masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh UNDP dan dijadikan referensi oleh Indonesia melalui Badan Pusat Statistik yaitu 15 tahun. Ada beberapa Kab/Kota di Aceh RLS-nya masih berada dibawah Nasional seperti Aceh Barat Daya (8,68 tahun), Gayo Lues (8,41 tahun), Aceh Timur (8,32 tahun) dan Kota Subulussalam (8,22 tahun).

Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi, tercermin dari kontribusi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terbesar adalah dari lulusan SMK (masih rendahnya persentase tenaga kerja berpendidikan menengah dan perguruan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi). Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 60 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi belum mencapai 40 persen dan pada SLB guru yang tersertifikasi belum mencapai 30 persen. Selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS yaitu mencapai 86,9 persen pada tingkatan pendidikan SLB.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun di Aceh sudah baik (83,10 persen) dibandingkan Nasional (73,15 persen) meskipun belum mencapai target 100 persen. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas, yaitu masih dibawah 40 persen. Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2022 masih sebesar 58,46 persen, menjadikan Aceh provinsi nomor 8 dengan IPLM terendah dan yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 83,63 persen.

Masih tingginya angkatan kerja pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase angkatan kerja terhadap usia kerja pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2022.

Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 70,18 tahun masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,85 tahun pada tahun 2022, Angka Kematian Ibu tahun 2022 di Aceh 141 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2022 yaitu sebesar 130 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2022 sebesar 31,20 persen sedangkan Nasional 21,60 persen.

Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dikarenakan menurunnya pendapatan dari otsus dan pada tahun 2028 akan berakhir. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, sehingga pemerintah sedang membangun 5 rumah sakit regional lagi yaitu Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dien di Meulaboh, Rumah Sakit Regional Yuliddin Awai di Tapaktuan, Rumah Sakit Regional Datu Beru di Takengon, Rumah Sakit Regional Langsa, dan Rumah Sakit Regional Bireuen.

Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan sehingga belum dapat memberikan pelayanan optimal bagi para pemakai jalan sebesar 84,41 persen (2022), di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen. Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RT/RW.

Adanya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Luasan permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 6.245,94 Ha tahun 2020 menjadi 7.419,78 Ha di tahun 2022. Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh tahun 2022 sebesar 89,7 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 91,05 persen dan Rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 77,48 persen dan nasional sebesar 86,03 persen pada tahun 2022.

Masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air (SDA) dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA. Belum optimalnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 60,39 persen tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal. Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir dan masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik yang mencapai 82,56 persen dari luas areal 65.409 Ha.

Masih tingginya pelanggaran dari tahun 2021 sebesar 472 pelanggaran menjadi 419 pelanggaran pada tahun 2022, walaupun turun masih menunjukan bahwa tingkat pelanggaran terhadapat ketentraman dan ketertiban umum masih di atas 400 pelanggaran. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu dan Pilkada pada 2019. Jumlah orang yang memiliki hak suara sebesar 3.453.990. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Aceh adalah 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilu 2024 mencapai 3.749.350 pemilih, dengan jumlah penduduk 5.407.855 jiwa dengan persentase kenaikan jumlah pemilih 8,55 persen dengan tambahan jumlah pemilih 295.360 jiwa dan 16.038 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pada pemilu 2019 terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terdapat 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireuen, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

Daya tampung dalam panti masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi. Tahun 2022 SPM Bidang Sosial Aceh sebesar 68,18 persen sedangkan target nasional 100 persen.

Pencapaian penerapan SPM bidang sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Aceh melebihi dari jumlah yang ditargetkan. Namun jumlah ini belum menggambarkan tuntasnya penanganan PPKS yang menjadi sasaran SPM bidang sosial diseluruh Aceh karena data jumlah PPKS yang perlu mendapat layanan rehabilitasi sosial di dalam panti maupun diluar panti belum valid. Misalnya, jumlah penyandang disabilitas yang sudah terdata diseluruh Aceh sebanyak 18.676 orang. Dari jumlah itu, belum ada data terpilah berapa orang penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan di dalam panti dan diluar panti. Hal ini berkait dengan minimnya Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos).

Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724. Tingkat pengangguran di Aceh pada tahun 2022 sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional yaitu sebesar 5,75 persen. Meningkatnya jumlah daerah rawan pangan Aceh yaitu tahun 2021 sejumlah 29 kecamatan meningkat menjadi 34 kecamatan di tahun 2022, pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang dan gejolak harga pangan yang sering timbul sehingga mengakibatkan kerugian di pihak produsen dan konsumen serta belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan. Skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan dan konsumsi pangan tahun 2022 masing-masing 85,89 dan 75,50 yang seharusnya sudah mencapai angka skor 100.

Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional 21 persen. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 persen sedangkan nasional 76,90 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2022 IPG Aceh 92,24 persen, sedangkan nasional 91,63 persen. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 (924 kasus) menjadi 1.029 kasus di tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Aceh sudah baik dibandingkan dengan Nasional, yaitu sebesar 58,01 persen sedangkan Nasional sebesar 54,04 persen. Namun demikian IPP Aceh belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00 persen. Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun. Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Aceh, dan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan sertifikat tanah.

Belum optimalnya Indeks Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Hidup Aceh masih 78,29 persen Tahun 2022 sedangkan Indeks Kualitas Hidup Nasional 72,42 persen. Namun Aceh masih belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 60,41 persen, lahan dengan capaian 76,24 persen serta gas rumah kaca. Terjadinya perubahan iklim dengan meningkatnya suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode 19 tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukan peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C.

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2022 sebesar 0,73 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026 (sesuai dengan target pada dokumen RPA Tahun 2023-2026). Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026. Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB, belum optimalnya Return On Asset (ROA) BUMD.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akta kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan by name by address. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan dibandingkan rerata nasional, masih rendahnya proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022. Hasil pertanian masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah. Produksi padi mengalami penurunan, pada tahun 2013 produksi padi Aceh sebanyak 1.937.889,5 ton dan pada tahun 2022 menjadi 1.533.138,1 ton atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun. Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 Ha menjadi 276.639,86 Ha pada tahun 2022 atau menyusut sebesar 32,76 persen.

Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2022 yaitu 107,45 dan 109,00.

Masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama tahun 2019-2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Masih tingginya kebakaran hutan dan lahan, tahun 2021 mencapai 358.867,00 ha dan pada tahun 2022 mencapai 204.894,00 ha. Seharusnya kebakaran hutan ini tidak perlu terjadi dilakukan dengan pencegahan yang sistematis.

Meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada tahun 2020-2022 terutama dengan gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera. Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada tahun 2021 seluas 262.728 Ha menjadi 264.922,53 Ha pada tahun 2022 dan kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.

Belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati, dan masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI) di 8 lokasi.

Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi karena Aceh masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Aceh, termasuk untuk kebutuhan pokok dan juga kontribusi perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 masih berkisar 13,87 persen, dan ekspor masih didominasi oleh bahan mentah dan bahan semi jadi sehingga nilai tambahnya tidak begitu besar yang diterima oleh daerah.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 baru sekitar 5,14 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif.

Belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku, potensi kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) dan *Destructive Fishing*, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi terbaru yang adaptif. Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities. Dan Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.

Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah. Berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen. Alokasi Dana Otsus yang diperuntukkan untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih di bawah 5 persen dari anggaran APBA, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan PPPK yang mencapai 7300 formasi, rendahnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen

Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran, masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh ditandai dengan Indeks Ketimpangan (Williamson) Aceh pada tahun 2022 berada pada angka 0,408.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan Per kapita Aceh masih berada di bawah Nasional. Pada tahun 2022 pengeluaran konsumsi non makanan Aceh sebesar 43,36 persen, sementara Nasional sebesar 49,86 persen. Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air minum layak 89,7 persen sedangkan di tingkat nasional 91,05 persen tahun 2022. Ketersediaan daya listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik masih sekitar 5,58 persen tahun 2022 dan target peningkatan tahun 2026 sebesar 22,08 persen. Masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB, nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 6,2 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 dapat meningkat meningkat menjadi Rp 12,86 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dan Kawasan Industri Perikanan Lampulo. IPM Aceh masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,80 yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72,91 dan masih tingginya angka kemiskinan.

Isu Strategis Aceh

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

1) Dinul Islam belum Kaffah
2) Pemajuan Budaya Aceh belum optimal
3) Otonomi khusus Aceh dalam NKRI belum optimal dan menyeluruh
4) Demokrasi masih belum optimal terutama antara nasionalisme dengan kedaerahan
5) Penanganan korban konflik belum tuntas
6) Konektivitas dan Aksesbilitas Infrastruktur belum optimal
7) Kemiskinan masih tinggi dan Pendapatan Per Kapita yang masih rendah
8) Ketahanan Pangan masih rentan
9) Kualitas Sumber daya Manusia masih rendah
10) Tata kelola yang profesional dan akuntabel serta inovatif belum optimal
11) Pengurangan Risiko Bencana belum optimal dan adaptif terhadap perubahan iklim belum menjadi mainstream.

Visi dan Misi
visi pembangunan Aceh Tahun 2025-2045 adalah:

"ACEH ISLAMI, DAMAI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

ISLAMI merupakan suatu kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam dalam aspek aqidah, syariah dan akhlak serta menjunjung tinggi adat dan kebudayaan Aceh yang Islami. Menghargai keberagaman dan inklusif sehingga terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

DAMAI merupakan suatu kondisi yang diharapkan oleh setiap masyarakat Aceh untuk memenuhi hak dasar tanpa diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan serta memiliki rasa aman dari konflik dalam pelaksanaan otonomi khusus dan perdamaian Aceh.

MAJU tercermin dari kondisi masyarakat Aceh yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil serta memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing ditingkat nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas SDM, menguatnya ekonomi, kelembagaan yang sehat, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik yang dinamis.

BERKELANJUTAN adalah kondisi pembangunan Aceh yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat.

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi adalah:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 235,00 - Rp 300,00 juta, dimana Pertumbuhan Ekonomi 5-6 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 1-2 persen.
2. Pelaksanaan Syariat Islam sehingga mencapai indeks pembangunan syariat Islam mencapai 90,00 - 95,00 persen dan pemajuan kebudayaan dengan indeks pembangunan budaya 63,00 - 68,00 persen, serta optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan penguatan perdamaian Aceh dengan rasio pencegahan dan mitigasi konflik menjadi 0,957.
3. Meningkatkan sumber daya manusia Aceh dengan capaian IPM Aceh menjadi 80 – 85 persen dan optimalisasi reformasi birokrasi di Pemerintahan Aceh menjadi 75 – 80 persen.
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan dan tangguh bencana melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dengan tingkat penurunan mencapai 81,96 persen.
5. Meningkatkan ketersediaan, konektivitas, dan aksesibilitas infrastruktur serta kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang dengan rasio konektivitas daerah.

Misi

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan transformasi masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami dan budaya Aceh
2) Penguatan masyarakat damai, demokratis, dan inklusif
3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur yang bekualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan peruntukan ruang dengan konsep pembangunan kewilayahan
4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
5) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
6) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
7) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Bersambung ke bagian II, Halaman 2 Serambi Indonesia edisi Kamis 30 November 2023,
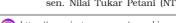
Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045

PEMERINTAH Aceh saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045. RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Aceh dalam jangka waktu 20 tahun.

RPJPA ini berisikan masalah pembangunan dan isu strategis yang harus diselesaikan, dengan menetapkan sasaran pokok sesuai dengan Harapan RPJPN 2025-2045. Tak hanya itu, RPJPA juga harus tepat dalam menetapkan arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok selama empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) ke depan 2025-2045.

RPJPA ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan.

Karenanya mohon masukan kepada para pembaca semua melalui atau langsung dikirimkan secara tertulis ke **Kantor Bappeda Aceh, Jalan Daud Beureueh No 26, Kuta Alam, Banda Aceh, dan juga melelui email: bappeda@acehprov.go.id.**

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Sasaran pokok 1: Peningkatan Syariat Islam yang Maslahat dengan Hidup rukun antar umat beragama, dengan arah kebijakan :

(1) Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al-Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh.
(2) Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas Wilayatul Hisbah, pembinaan dan pengawasan.
(3) Meningkatkan pembinaan karakter Islami untuk melahirkan aparatur dan masyarakat yang memiliki integritas dan berkapasitas.
(4) Pendidikan agama melalui penambahan jam belajar Agama Islam di sekolah umum serta pengembangan mutu dan kurikulum standar serta guru TPA yang memiliki kualifikasi tertentu.
(5) Kepatuhan membayar zakat, infaq dan sadaqah di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.
(6) Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan serta pengamalan ibadah dan penyemarakan syiar Islam.
(7) Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui peningkatan manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.
(8) Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.
(9) Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.
(10) Pengembangan kualitas mutu pendidikan agama melalui kurikulum berbasis Islami dan berkarakter adat budaya ke Aceh-an.
(11) Peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama melalui perguatan koordinasi dan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
(12) Terwujudnya Moderasi Beragama melalui sinergisitas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dan masyarakat.

Tabel 1
Indikator Capaian Syariat Islam Yang Maslahat Dengan Hidup Rukun Antar Umat Beragama

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami dan budaya Aceh				
Peningkatan Syariat Islam yang Maslahat dengan hidup rukun antar umat beragama	1	Indeks Pembangunan Syariah	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00
	2	Indeks kerukunan umat beragama	63,6 (2021)	80,00 - 84,00

Sasaran pokok 2: Berkebudayaan yang Maju, dengan arah kebijakan :

(1) Penguatan karakter dan jati diri Aceh dalam bingkai NKRI melalui budaya Aceh yang Islami.
(2) Pelestarian warisan budaya, penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan Islami yang Pancasila.
(3) Melestarikan budaya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional Aceh.
(4) Perkuatan kelembagaan adat Aceh seperti Mukim, Panglima Laot dan sebagainya.
(5) Mengembangkan pelestarian dan daya cipta budaya melalui perkuatan sarana dan prasarana ekspresi budaya dan budaya literasi.
(6) Partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
(7) Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif masyarakat Aceh.
(8) Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan Aceh sebagai salah satu pilar kebudayaan nasional.
(9) Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan pariwisata.
(10) Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.
(11) Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.
(12) Meningkatkan peran Pemerintah Aceh sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan serta pokok-pokok kebudayaan daerah.

Tabel 2
Indikator Capaian Indikator Berkebudayaan yang Maju

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami dan budaya Aceh				
Berkebudayaan yang Maju	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	49,89 (2021)	63,00 - 68,00

Sasaran Pokok 3: Perkuatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Penekanan Demokrasi Yang Subtansial dan Peningkatan Intervensi Penanganan Korban Konflik dengan arah kebijakan :

(1) Penguatan Otonomi Aceh melalui penyelenggaraan otonomi Aceh berbasis karakter dan maturitas Aceh, serta memperkuat kewenangan Aceh dengan pusat, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
(2) Mengupayakan kelanjutan dana Otonomi khusus bagi pembangunan Aceh yang damai, Islami, maju dan berkelanjutan.
(3) Rekonsiliasi melalui penanganan, pencegahan dan mitigasi korban konflik
(4) Masyarakat yang tertib dan tenteram melalui penguatan kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dan mendukung upaya pihak kepolisian dalam menegakkan hukum untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
(5) Pembangunan demokrasi melalui harmonisasi antara politik lokal dan nasional serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
(6) Penguatan peran pemerintah Aceh, kabupaten/kota, lembaga demokrasi dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat melalui pembinaan dan Koordinasi yang kuat untuk lingkungan masyarakat yang demokratis.

Tabel 3
Indikator Capaian Perkuatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Demokrasi, Penanganan Korban Konflik

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Perkuatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Penekanan Demokrasi Yang Substansial dan Peningkatan Intervensi Penanganan Korban Konflik	1	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34.78	100
	2	Indeks demokrasi	80,92 - 82,00	85,00 - 90,00
	3	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	28.99	95

Sasaran Pokok 4: Infrastruktur yang mantap dan baik dengan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan :

(1) Perencanaan tata ruang dan percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya) dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
(2) Meningkatkan kualitas jalan provinsi dalam kondisi mantap dan terkoneksi dengan jalan kabupaten/kota serta jalan nasional terutama di Kabupaten Simeulue, Singkil, Aceh Besar.
(3) Penyediaan infrastruktur yang merata terutama akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman terutama di kawasan perkotaan yang berkelanjutan melalui inovasi teknologi yang didukung dengan peran serta masyarakat.
(4) Penguatan infrastruktur dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang inklusif, bebas kumuh, berkelanjutan, dan berketahanan terutama di Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Subulussalam dan Takengon.
(5) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
(6) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).
(7) Penguatan pengelolaan jalan lingkungan dan jalan desa
(8) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Langsa dan Takengon.
(9) Pengembangan permukiman dan perumahan berbasis entitas yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif dan berkelanjutan.
(10) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
(11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antar stakeholder dalam pengembangan daerah irigasi dengan mordenisasi irigasi untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
(12) Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, efisien dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan terintegrasi kebutuhan air untuk irigasi dan air baku, konservasi sumber daya air, efisiensi penggunaan air, pengelolaan DAS dan pengelolaan risiko bencana, pembentukan regulasi kebijakan pengelolaan sumber daya air.
(13) Meningkatkan ketahanan terhadap banjir, mengidentifikasi kawasan rawan banjir, pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan tata air secara terintegrasi serta pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air, (Decision Support System (DSS), forecasting, early warning) dan sosialiasi kebijakan pengelolaan sumber daya air.
(14) Peningkatan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku dengan pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, real-time system, water accounting system) serta pola pikir baru (antara lain: model based management, uncertaily analysis dan community based data).
(15) Peningkatan infrastruktur pengelolaan air, penerapan tekhnologi untuk menghasilkan analisa data yang akurat, mengoptimalkan sistim penyediaan air untuk sektor pertanian dan air baku, penataan ruang dengan mengelola lahan dan sumber daya air dengan efisien, penguatan kebijakan dan regulasi serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
(16) Standarisasi infrastruktur transportasi yang terintegrasi, modern, berwawasan lingkungan, andal, berdaya saing, inklusif dan bertaraf internasional.
(17) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan terutama di Simeulue, Sabang, Singkil, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Besar.
(18) Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama di Banda Aceh dan sekitarnya, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, dan Takengon.
(19) Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama di Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi.
(20) Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis yang ada di Aceh.
(21) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
(22) Akses komunikasi dan telekomunikasi terutama di wilayah yang belum terjangkau di Gayo lues, Aceh Timur, Aceh Selatan, Nagan Raya, Singkil, Aceh Barat, Pidie, Simeulue, Aceh Besar, dan Aceh Tengah.
(23) Mendukung dan percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, percepatan pelaksanaan reforma agraria.
(24) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi khususnya di Simeulue, Singkil Aceh Besar yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah tersebut melalui bertambahnya demand.
(25) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi).

Tabel 4
Indikator Capaian Infrastruktur yang mantap dan baik dengan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur sesuai dengan peruntukan ruang				
Infrastruktur yang mantap dan baik dengan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1	Kondisi Jalan provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	85 - 87	90 - 95
	2	Persentase akses air minum layak	88 - 90	95 - 98
	3	Persentase akses sanitasi layak	77 - 79	87 - 90
	4	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	60,00 - 61,00	95,00 - 98,00
	5	Persentase luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama (%)	30 - 40	50 - 60
	6	Rasio Konektivitas	0,73 - 0,77	0,85 - 0,90
	7	Kesesesuaian Pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	95	99
	8	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	0.154	0.200

Sasaran Pokok 5: Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi antara dosmetik dan global menuju masyarakat yang sejahtera, dengan arah kebijakan :

(1) Meningkatkan sektor industri pengolahan melalui penyiapan SDM dan infrastruktur di bidang industri berbasis kawasan.
(2) Pembangunan industri Aceh yang kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri yang berdaya saing dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
(3) Meningkatkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif.
(4) Percepatan transformasi koperasi dan UMKM untuk dapat menciptakan nilai tambah dan peningkatan produktivitas sebagai upaya dalam pemenuhan rantai nilai lokal dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan, pemasaran, digitalisasi dan teknologi).
(5) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Simeulue, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Bireun, Sabang, Singkil, Aceh Tengah.
(6) Meningkatkan koperasi aktif.
(7) Meningkatkan rasio pembiayaan domestik.
(8) Meningkatkan kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja untuk menurunkan pengangguran.
(9) Pengembangan kawasan transmigrasi.
(10) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
(11) Penguatan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang berkeadilan.
(12) Peningkatan produktivitas BUMD melalui peningkatan penyertaan modal, intensifikasi dan ekstensifikasi usaha yang inovatif.
(13) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di khususnya di Simeulue, Aceh Utara, Singkil, Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
(14) Penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah.
(15) Mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan peningkatan efektifitas rantai distribusi.
(16) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
(17) Meningkatkan rasio ekspor.
(18) Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi melalui penciptaan regulasi Pro Investasi yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan penanaman modal, meningkatkan kualitas infrastruktur investasi.
(19) Peningkatan investasi Aceh di sektor pariwisata melalui pengembangan SDM dan infrastruktur yang berkelanjutan dalam upaya untuk memperkenalkan potensi Aceh yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
(20) Meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatan ekonomi pedesaan, sosial dan lingkungan, penerapan teknologi tepat guna yang inovatif.
(21) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.
(22) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
(23) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
(24) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
(25) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
(26) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA uggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
(27) Penguatan regulasi dan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan migas dan minerba yang menjadi kewenangan Aceh.

Tabel 5
Indikator Capaian Produktivitas Ekonomi dan Stabilitas Ekonomi Makro

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan				
Produktivitas ekonomi, ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi antara dosmetik dan global menuju masyarakat yang sejahtera	1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4,00 - 4,50	7,00 - 10,00
	2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)	0.019	0.039
	3	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	67	81,00 - 87,00
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24 - 5,50	2,00 - 3,00
	5	Rasio Ketergantungan	49,19 - 46,00	29,00 - 30,00
	6	Pertumbuhan Ekonomi	4,63 -5,00	5,00 - 6,00
	7	PDRB Perkapita (Juta)	36,69 - 40,00	250 - 300
	8	Indeks Williamson	0,406 - 0,400	0,350 - 0,320
	9	Gini Ratio	0,301 - 0,290	0,250 - 0,270
	10	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA (Trilyun)	7,00 - 10,00	12,00 - 15,00
	11	Indek Desa Membangun	0,63 - 0,66	0,70 - 0,80
	12	Inflasi	4	3
	13	Rasio keterbukaan ekonomi (E+I/PDRBtotal)	4.96	7
	14	Rasio kredit domestik sektor keuangan terhadap PDRB	60,00 - 62,00	85,00 - 101,00
	15	Kunjungan wisata	3,093,405	4-5 Juta

Sasaran Pokok 6: Meningkatkan ketahanan pangan melalui produktivitas bahan pokok di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dengan arah kebijakan:

(1) Mampu bersaing di pasar global dengan penjaminan keamanan pangan sehingga terciptanya produk pangan berkualitas dan berdaya saing.
(2) Tercapainya kedaulatan pangan dengan tatakelola sistem pangan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
(3) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan peternak.
(4) Meningkatkan kemandirian ketersediaan pakan ternak lokal, bibit lokal dan pengolahan pasca panen serta pencegahan penyakit hewan menular.
(5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian berkelanjutan berbasis kewilayahan.
(6) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi smart farming.
(7) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani.
(8) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
(9) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian serta penambahan Grace Period KUR Khusus.
(10) Optimalisasi pengembangan sumberdaya wilayah dan peningkatan infrastruktur pangan dan memperkuat sinergisitas kerjasama antar instansi dan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan.
(11) Mendorong investasi dan inovasi teknologi dalam sektor agribisnis serta modernisasi industri pangan sumberdaya lokal untuk peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi.
(12) Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Modernisasi kapal, sarana dan prasarana produksi perikanan.
(13) Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
(14) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
(15) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
(16) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
(17) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
(18) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(19) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
(20) Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
(21) Peningkatan kapasistas unit-unit pembenihan dalam mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan, pengembangan dan peningkatan industri perikanan dalam mendukung ketersediaan bahan baku dan efisiensi penerapan teknologi perikanan (Total Produksi, AKI, Nilai Ekspor, EVIKA, persentase kepatuhan pelaku usaha).
(22) Optimalisasi kelompok usaha dan hilirisasi industri perikanan dalam rangka meningkatkan nilai produksi, investasi dan pemasaran yang produktif, berteknologi, memiliki sertifikasi/ standarisasi produk perikanan yang berdaya saing unggul berbasis blue ekonomi (Total Produksi, AKI, Nilai Ekspor,EVIKA, Persentase kepatuhan pelaku usaha).
(23) Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Tabel 6
Indikator Capaian Ketahanan Pangan

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan				
	1	Indeks Ketahanan Pangan	70,00 - 75,00	80,00 - 85,00
	2	NTP	105,00 - 108,00	110,00 - 115,00
	3	NTN	103 - 104	110 - 115
	4	NTPi	98 - 100	110 - 115
	5	Indeks Williamson	0,406 - 0,400	0,350 - 0,320

Sasaran Pokok 7: Pendidikan berkualitas dan merata, dengan arah kebijakan:

(1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
(2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
(3) Penguatan kurikulum pendidikan luar biasa dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
(4) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan dunia kerja.
(5) Peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dayah.
(6) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP di Simeulue, Singkil, Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Timur.
(7) Meningkatkan sistem pendidikan yang kuat dan inklusif dengan akses yang merata.
(8) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
(9) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
(10) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
(11) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Luar Biasa dan Menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
(12) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Simeulue, Singkil, Aceh Besar dan Pidie, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
(13) Meningkatkan Pendidikan Vokasional.
(14) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
(15) Mendukung restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
(16) Meningkatkan literasi masyarakat melalui peningkatan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan.
(17) Meningkatkan arsip ditigal.
(18) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan prestasi dan rekreasi (olahraga masyarakat).

Tabel 7
Indikator Capaian Pendidikan Berkualitas dan Merata

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Pendidikan Berkualitas dan merata	1	IPM	72,98 - 73,00	77,00 - 78,00
	2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14 - 15	15 - 16
	3	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	9-10	11-12
	4	Indeks Literasi	58 - 60	66 - 68
	5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	58.9	67.9

Bersambung ke bagian III, Halaman 2
Serambi Indonesia edisi Jumat 1 Desember 2023,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045

PEMERINTAH Aceh saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045. RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Aceh dalam jangka waktu 20 tahun.

RPJPA ini berisikan masalah pembangunan dan isu strategis yang harus diselesaikan, dengan menetapkan sasaran pokok sesuai dengan Harapan RPJPN 2025-2045. Tak hanya itu, RPJPA juga harus tepat dalam menetapkan arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok selama empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) ke depan 2025-2045.

RPJPA ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan.

Karenanya mohon masukan kepada para pembaca semua melalui atau langsung dikirimkan secara tertulis ke **Kantor Bappeda Aceh, Jalan Daud Beureueh No 26, Kuta Alam, Banda Aceh, dan juga melelui email: bappeda@acehprov.go.id.**

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Sasaran Pokok 8: Kesehatan untuk semua dengan arah kebijakan

(1) Promosi kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
(2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer, rujukan, pendidikan dan rehabilitasi phisikososial, narkotika dan zat adiktif lainnya, anak berkebutuhan khusus terutama rumah sakit regional.
(3) Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).
(4) Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.
(5) Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, diabetes melitus, gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.
(6) Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
(7) Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
(8) Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan.

Tabel 8
Indikator Capaian Kesehatan Untuk Semua

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup	70 - 71	79 - 80
	2	Angka Kematian Ibu (AKI)	141 - 143	80 - 90
	3	Stunting	27 - 29	17 - 19
	4	Cakupan kepesertaan/Jumlah Penduduk	100	100
	5	Tuberkolosis (insidensi /100.000 penduduk)	205	76

Sasaran Pokok 9 : Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi dengan arah kebijakan:

(1) Pembangunan keluarga yang berkualitas dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya berbasis kearifan lokal melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai yang Islami, landasan legalitas, integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio budaya serta phisikologi.
(2) Pemberdayaan Gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perbaikan kesehatan ibu hamil, peningkatan pendidikan perempuan.
(3) Perlindungan Anak melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.
(4) Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk perdagangan orang.
(5) Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Tabel 9
Indikator Capaian Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi	1	Indeks Ketimpangan Gender	0,504	0,428 - 0,407
	2	Indeks Pembangunan Keluarga	57,79	62,84 - 64,22
	3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	46,15	49,33 - 50,15

Sasaran Pokok 10 : Perlindungan Sosial yang adaptif dengan arah kebijakan:

(1) Penuntasan kemiskinan dengan satu slstem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
(2) Menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemenuhan layanan dasar, dan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin.
(3) Meningkatkan dan pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
(4) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada kantong-kantong kemiskinan terutama di Aceh Utara, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
(5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
(6) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
(7) Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan untuk seluruh penduduk.
(8) Pemberdayaan penyandang disabilitas, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
(9) Meningkatkan partisipasi penyandang disabilititas sektor formal, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Tabel 10
Indikator Capaian Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Perlindungan Sosial yang adaptif	1	Tingkat Kemiskinan	14-15	1-2
	2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagkerjaan (%)	38.09	99.5
	3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	25.8	50

Sasaran Pokok 11: Transformasi Iptek dan digital, dengan arah kebijakan:

(1) Peningkatan anggaran IPTEKIN Aceh menuju komersialisasi oleh industri.
(2) Pengelolaan pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui perkuatan regulasi, pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur digital dan teknologi, keterpaduan data, modal investasi teknologi, riset dan inovasi.
(3) Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).
(4) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
(5) Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.
(6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
(7) Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.

Tabel 11
Indikator Capaian Transformasi Iptek dan digital

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Transformasi Iptek dan digital	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19 - 3,50	4,20 - 5,00

Sasaran Pokok 12 : Meningkatkan perencanaan, kemandirian fiskal, dengan arah kebijakan:

(1) Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian, pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBA, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
(2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
(3) Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya).
(4) Peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
(5) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh, untuk memaksimalkan pendapatan dari asset Pemerintah Aceh serta pajak serta restribusi Aceh.

Tabel 12
Indikator Capaian Kemandirian Fiskal

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Kemandirian Fiskal	1	Indeks Kemandirian Fiskal (1,789 kategori sedang)	SEDANG	SEDANG

Sasaran Pokok 13: Reformasi Birokrasi dan profesionalisme ASN, dengan arah kebijakan:

(1) Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif melalui penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan egle, pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN, pelaksanaan arsitekstur SPBE Nasional, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi, penguatan pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan arsip digital, pelaksanaan pelayanan publik digital, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan tatakelola kebijakan publik, pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan data statistik sektoral, penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembangunan zona integritas di unit kerja, penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penguatan upaya pencegahan korupsi.
(2) Terciptanya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif melalui penguatan sistem merit, penguatan profesionalitas ASN, implementasi NSPK manajemen ASN, Penataan jabatan fungsional, penguatan manajemen talenta ASN, pengelolaan kinerja pegawai ASN, pelaksanaan core value dan pelaksanaan pelayanan publik prima.

Tabel 13
Indikator Capaian Reformasi Birokrasi

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Profesionalisme ASN	1	Indeks profesionalisme ASN	30,60 - 50,90	90,90 - 100
Reformasi Birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	65 - 70	75 – 80

Sasaran Pokok 15 : Peningkatkan Inovasi Daerah menuju Tata Kelola Pemerintah yang efisien dan efektif, dengan arah kebijakan:

(1) Memperkuat penelitian dan iklim inovasi daerah melalui perkuatan regulasi dan kebijakan internal pada institusi teknis.
(2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah dan nasional yang berdaya saing di tataran global.
(3) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

Tabel 14
Indikator Capaian Inovasi Daerah

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Inovasi Daerah	55	Indeks Inovasi Daerah	60	90

Sasaran Pokok 16 : Pemberantasan Korupsi, dengan arah kebijakan:

(1) Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, peningkatan pengawasan pembangunan.
(2) Penguatan tata kelola pencegahan korupsi.
(3) Pengidentifikasian pada unit kerja dan aparatur negara yang menjalankan budaya integritas sebagai alat ukur objektif untuk mengukur kinerja pemberantasan korupsi.

Tabel 15
Indikator Capaian Pemberantasan Korupsi

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Pemberantasan Korupsi	1	Sistem Penilaian Integritas	80,16 - 81,00	87 - 90

Sasaran Pokok 17 : Memenuhi standar Pelayanan Minimal, dengan arah kebijakan:

(1) Meningkatkan standar pelayanan minimal melalui perkuatan regulasi.
(2) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
(3) Menyusun program pembangunan Aceh sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Aceh yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
(4) Perkuatan koordinasi tim Penerapan SPM daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Penerapan SPM.
(5) integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja SKPA termasuk pembinaan umum dan pengawasan.
(6) Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Tabel 16
Indikator Capaian standar Pelayanan Minimal

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif yang berintegritas dan adaptif				
Pelayanan Minimal	1	Indeks Capaian Penerapan SPM	71,11 - 73,58	85 - 95

Sasaran Pokok 18 : Resilien terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan arah kebijakan:

(1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi hijau.
(2) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
(3) Penurunan indek risiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah seperti perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.
(4) penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
(5) Menurunkan Risiko Bencana dan meningkatkan penanganan luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama;
(6) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;
(7) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
(8) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Langsa dan Takengon.

Tabel 17
Indikator Capaian Resilien Terhadap Bencana Perubahan Iklim

Sasaran (Tujuan) Pembangunan		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
Resilien terhadap bencana perubahan iklim	1	Indeks Risiko Bencana	149,10 - 140 (TINGGI)	132 - 130 (SEDANG)

Sasaran Pokok 19 : Pengeloaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan energi dan air, dengan arah kebijakan

(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
(2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
(3) Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity.
(4) Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.
(5) Menurunkan kerusakan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga.
(6) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
(7) Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau melalui peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan.
(8) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
(9) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau pembangunan yang berorientasi rendah karbon dan mempercepat ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian Energi Listrik.
(10) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
(11) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
(12) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jariqan listrik terintegrasi.
(13) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
(14) Penguatan regulasi dan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan
(15) Percepatan transformasi dan informasi serta kemudahan perizinan di sektor pengembangan energi baru terbarukan.
(16) Percepatan peningkatan pengembangan energi baru terbarukan dengan mengedepankan daya saing EBT sebagai energi bersih.
(17) Terwujudnya pemenuhan pembangkit energi listrik bersumber dari energi baru terbarukan.

Tabel 18
Indikator Capaian Pengeloaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Air

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	64 Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;				
Pengeloaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan energi dan air	1	IKLH	78,00 - 80,00	85,00 - 90,00
	2	Emisi GRK	29.94	81.96
	3	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian Energi Listrik	23 - 24	50 - 60
	4	konflik satwa liar (kasus)	500	
	5	Indeks Ekonomi Hijau	72 - 73 (Peringkat 27 se-indonesia)	85-90

Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang

Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang dan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda dan untuk memastikan otonomi daerah secara nyata mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan, maka seluruh daerah otonom diharapkan untuk menjaga 7 (tujuh) fokus pembangunan. Oleh karena itu, selain target rangkaian kinerja yang merupakan penggambaran pencapaian visi pembangunan daerah sampai tahun 2045, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menentukan target kinerja yang menggambarkan 7 (tujuh) fokus pembangunan daerah.

Tabel 19
Tabel Kinerja Wajib Pembangunan

No	Fokus	Kinerja		indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	1	PDRB Perkapita (Juta)	36,69 - 40,00	250 - 300
			2	Tingkat Kemiskinan	14-15	1-2
			3	Gini Ratio	0,301 - 0,290	0,250 - 0,270
			4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24 - 5,50	2,00 - 3,00
			5	NTP	105,00 - 108,00	110,00 - 115,00
			6	NTN	103 - 104	110 - 115
			7	NTPi	98 - 100	110 - 115
2	Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	1	Kondisi Jalan provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	85 - 87	90 - 95
			2	Persentase akses air minum layak	88 - 90	95 - 98
			3	Persentase akses sanitasi layak	77 - 79	87 - 90
			4	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	60,00 - 61,00	95,00 - 98,00
			5	Persentase luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama (%)	30 - 40	50 - 60
			6	Rasio Konektivitas	0,73 - 0,77	0,85 - 0,90
			7	Kesesesuaian Pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	95	99
			8	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	0.154	
3	Peningkatan Produktivitas Daerah	Meningkatnya produktivitas daerah	1	Indeks Ekonomi Hijau	72 - 73 (Peringkat 27 se-indonesia)	85-90
			2	Indeks Ketahanan Pangan	70,00 - 75,00	80,00 - 85,00
			3	Rasio Kewirausahaan		
			4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)	0.019	0.039
			5	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	67	81,00 - 87,00
4	Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	Meningkanya kualitas SDM	1	IPM	72,98 - 73,00	77,00 - 78,00
			2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14 - 15	15 - 16
			3	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	9-10	11-12
			4	Indeks Literasi	58 - 60	82 - 90
			5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	58.9	67.9
			6	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		
			9	Usia Harapan Hidup	70 - 71	79 - 80
			10	Angka Kematian Ibu (AKI)	141 - 143	80 - 90
			11	Stunting	27 - 29	17 - 19
			12	Cakupan kepesertaan/Jlh Penduduk	100	100
			13	Tuberkolosis (insidensi /100.000 penduduk)	205	76
			15	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagkerjaan (%)	38.09	99.5
			16	Persentase capaian standar pelayanan minimal bidang sosial	70 - 80	85 - 95
			17	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	25.8	50
5	Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju	Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	1	Indeks Pembangunan Keluarga	60.43	63,00 - 65,00
			2	Indeks Pembangunan Budaya	49,89 (2021)	63,00 - 68,00
			3	Indeks kerukunan umat beragama	63,6 (2021)	80,00 - 84,00
			4	Indeks Pemberdayaan Gender	63.92	78,00 - 80,00
			5	Indeks Ketimpangan Gender		
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	IKLH	78,00 - 80,00	85,00 - 90,00
			2	Indeks Ketahanan Daerah		
			3	Emisi GRK	29.94	81.96
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19 - 3,50	4,00 - 5,00
			2	Indeks Kemandirian Fiskal (1,789 kategori sedang)	SEDANG	SEDANG
			3	Indeks profesionalisme ASN	82 - 83	90 - 95
			4	Indeks Reformasi Birokrasi	65 - 70	75 - 80
			5	Indeks Inovasi Daerah	60	90
			6	Jumlah orang yang sudah divonis dalam kasus korupsi	388	5
			7	Indeks Pelayanan Publik		
			8	Persentase capaian standar pelayanan minimal	70 - 80	85 - 95